

**PENGELOLA USAHA MIKRO DAN KECIL DI BENGKULU
(Penguatan Ekonomi Lokal di Wilayah Pesisir)**

**THE MANAGEMENT OF MICRO AND SMALL BUSINESS IN BENGKULU
(economic local strengthening in the region of coastal area)**

Masydzulhak DJamil

Dosen universitas Mercua Buana

ABSTRACT

Regional autonomy essentially is the central government policy to quicken the development and service to public in region. Nevertheless, there are still many constraints and obstacles for development in some region. This might be caused by the incapability of Government in interpreting the meaning of regional autonomy. Small and medium industry (UKM) have been proven been able to survive in economic crisis in the year 1997 / 1998. The time has come for Government to make cooperation and give bigger opportunity to grow UKM business. Scale number of (UKM) in Bengkulu province can become economic bases of area either for economic regional contribution or PDRB and labor absorption. The policy of small and middle business management is to effectively arrange and efficiency applied resource, with considering regional carrying capacity of coastal area.

Otonomi daerah hakikatnya adalah kebijakan Pemerintah Pusat mempercepat laju pembangunan dan pelayanan masyarakat, di tingkat daerah. Namun pembangunan di daerah masih banyak terdapat kendala dan permasalahan diantaranya belum mampunya Pemerintah daerah memaknai secara jelas isi dari Otonomi daerah. Di Provinsi Bengkulu peranan usaha kecil dan menengah dalam mengerakan perekonomian daerah sangat berpengaruh, dengan jumlah sebanyak 64.893. Usaha kecil dan menengah adalah kelompok yang strategis dalam menentukan pembangunan ekonomi. Usaha kecil dan menengah (UMKM) telah terbukti mampu bertahan terhadap krisis ekonomi pada tahun 1997/1998. Pemerintah Daerah sudah saatnya mengalang kerjasama dan memberikan peluang yang lebih besar dalam pertumbuhan usahanya. Besarnya jumlah UMKM di Provinsi Bengkulu dapat menjadi basis ekonomi daerah baik dalam terhadap sumbangan ekonomi wilayah atau PDRB dan penyerapan tenaga kerja.

Kebijakan pengelolaan usaha kecil dan menengah adalah melakukan efektifitas pengaturan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya ekonomi, dengan tetap mempertimbangkan daya dukung wilayah pesisir.

Kata Kunci: Otonomi, Ekonomi Lokal, Wilayah Pesisir.

PENDAHULUAN

Kometmen Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah salah satunya diberlakukan Undang-Undang Pemerintah Daerah Tahun 1999 dan di revisi pada Tahun 2004, yaitu Undang-Undang No.32 dan Undang No.33.

Undang-Undang No.32 dan No.33 Tahun 2004 tersebut pada hakikatnya mendorong pembangunan di daerah secara cepat dan terpadu sesuai dengan daya dukung yang ada (Sumberdaya Manusia, Sumberdaya buatan, Sumberdaya alam) dengan demikian diharapkan Pemerintah daerah akan mampu mengelola pembangunan sesuai dengan kapasitas daya serap.

Realitas menunjukkan bahwa sejak digulirkan Undang-Undang Otonomi Daerah, pembangunan daerah pada umumnya belum berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh Undang-undang tersebut, masih banyak kendala dan permasalahan di daerah yang muncul dari mulai penyimpangan operasional pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini disebabkan Pemerintah daerah masih belum mampu dalam mengenali kondisi daerah secara substansial, terutama daya dukung sumberdaya daerah berupa; sumberdaya buatan, sumberdaya alam dan yang lebih penting lagi adalah sumberdaya manusia, akibatnya perencanaan pembangunan jarang menyentuh apa yang diharapkan rakyat di daerah.

Pembangunan pada saat ini masih terpola seperti pada masa era orde baru, dan masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat, belum muncul ide-ide cerdas dalam menumbuhkembangkan pembangunan untuk rakyat banyak. Belum mampunya Pemerintah daerah memahami arah pembangunan di daerahnya sehingga sampai saat ini masih lambannya pertumbuhan pembangunan di daerah.

Pada dasarnya otonomi daerah pendorong dan pemicu dalam pertumbuhan perekonomian rakyat, hal ini disebabkan otonomi daerah dapat menjadi *guideline* dalam pembangunan perekonomian rakyat

terutama usaha mikro dan kecil sebagai panduan penguatan ekonomi lokal di era otonomi; (i) dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro dan kecil untuk lebih meningkatkan produktivitasnya, (ii) panduan; dapat memberikan peluang dan tumbuh berkembangnya kearifan lokal dan tatanan kegiatan usaha yang sesuai dengan daya dukung dan kemampuan masyarakat, (iii) sebagai panduan *kelembagaan dan hukum* untuk menjadi payung dalam pengelolaan usaha mikro dan kecil di daerah.

Penguatan ekonomi lokal di era otonomi sebagai peluang untuk lebih menumbuhkembangkan perekonomian yang berbasis sumberdaya yang ada menjadi sentra ekonomi baru dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Peluang-peluang pengembangan perekonomian di era otonomi ini, seharusnya dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam memacu pembangunan ekonomi rakyat terutama usaha mikro dan kecil sebagai modal dasar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

ISU DAN PERMASALAHAN USAHA MIKRO DAN KECIL

Usaha mikro dan kecil sebagai ekonomi dan kelompok usaha yang paling banyak peranannya terhadap ekonomi kerakyatan karena usaha mikro dan kecil bergerak di antara menengah dan bawah, sebagai usaha yang paling banyak memberikan kontribusi dalam memenuhi keperluan rakyat banyak.

Usaha mikro dan kecil telah terbukti mampu menghidupkan perekonomian Nasional pada masa krisis tahun 1998, dan pada waktu krisis ekonomi dan moneter banyak usaha skala besar atau sering disebut usaha para konglomerat berjatuh dan limbung dalam menghadapi krisis ekonomi dan moneter, sedangkan usaha mikro dan kecil, menengah masih banyak bertahan, dari hasil survei Badan Litbang Koperasi pada awal 1998 jumlah pengusaha kecil 225 ribu dan 64 % mampu bertahan, 31 % mengurangi kegiatan usaha dan hanya 4% menghentikan usahanya

(Prawirokusumo, 2001), dari laporan Badan Litbang Kementerian Koperasi tersebut tergambar bahwa kelompok inilah yang menjalankan roda ekonomi bangsa sampai saat ini.

Kuatnya daya tahan usaha mikro, kecil dan menengah dalam badai krisis ekonomi dan moneter, telah menjadi isu perlunya penguatan ekonomi rakyat, yang di-identifikasikan pada usaha mikro dan kecil serta koperasi.

Usaha besar atau usaha konglomerat sudah tidak relevan lagi untuk itu cara pandang dalam pembangunan perlu ada perubahan dalam tataran kebijakan perekonomian Nasional yang lebih memberikan ruang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, sebagai tulang punggung perekonomian bangsa.

Isu penguatan ekonomi usaha mikro, kecil dan koperasi semakin kencang dengan diberlakukannya otonomi daerah, dan sudah saatnya pemerintah daerah mengkaji kembali potensi daerahnya terutama usaha-usaha yang berbasis sumberdaya daerah itu sendiri.

Permasalahan yang muncul di-era otonomi saat ini adalah penguatan ekonomi lokal namun masih banyak pimpinan daerah memahami dan mengenali potensi daerahnya sendiri, dan kelemahan lainnya kekurangannya tenaga yang profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah.

Selanjutnya pembangunan infrastruktur daerah belum dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, titik lemah yang lainnya perangkat peraturan daerah (perda) belum mendukung dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi. Sehingga memunculkan penyimpangan-penyimpangan antara lain rusaknya sumberdaya alam di daerah disebabkan hanya untuk mengejar pendapatan Asli daerah (PAD), banyak peraturan daerah yang menghambat pertumbuhan perekonomian masyarakat, dan terjadinya KKN di daerah.

PERSPEKTIF PENGUATAN EKONOMI LOKAL WILAYAH PESISIR.

Wilayah pesisir dari mulai pembangunan dimasa order baru sampai masa reformasi saat ini masih jauh tertinggal dengan pembangunan wilayah daratan (*up land*), wilayah pesisir masih dianggap sebagai penampung limbah, dan kumuh. Kalaupun adanya pembangunan masih bersifat sektoral belum mempertimbangkan secara terpadu.

Untuk itu pembangunan wilayah pesisir memerlukan suatu konsep baru yang terpadu, pembangunan terpadu tersebut adalah pembangunan yang memperhitungkan daya dukung yang meliputi, ekologi, ekonomi, kearifan lokal, dan meminimumkan kerusakan-kerusakan sumberdaya wilayah pesisir. Konsep yang tepat dalam pembangunan wilayah pesisir adalah pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Dimasa orde baru pembangunan di Indonesia telah menerapkan sistem pembangunan dengan beberapa pendekatan yang dilakukan; *pertama* pendekatan yang difokuskan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang disebut *Growth Paradigm* dengan kebijakan investasi, perdagangan, dan industrilisasi, pada awalnya konsep ini cukup berhasil namun tidak menguntungkan bagi usaha mikro dan kecil.

Kedua Pembangunan ekonomi dilakukan dengan fokus pertumbuhan dan pemerataan atau sering disebut (*Growth and equity of strategy development*), fokusnya mengedepankan "investasi sumber daya manusia" dan "pembangunan sosial" konsep ini masih tidak mampu mendorong pembangunan ekonomi di daerah disebabkan masih banyak pengangguran, urbanisasi, kesehatan, dan belum meningkatnya pendapatan rakyat banyak.

Ketiga, konsep pembangunan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dalam hal ini sering disebut adalah pembangunan terpadu dan konsep ini yang paling tepat untuk pembangunan

wilayah pesisir, karena fokus dari pembangunan berkelanjutan mempertimbangan daya dukung daerah dan ekosistem sumberdaya alam terutama ekologi, dengan meminimumkan kerusakan sumberdaya alam dan tetap memperhatikan kearifan lokal dan memperhitungkan kepentingan pembangunan masa depan bagi generasi masa datang.

Menurut Munasinghe (2001) menyatakan pembangunan berkelanjutan suatu kegiatan yang penggunaan sumberdaya untuk meningkatkan kesejahteraan individu /masyarakat secara efisien dan memberikan kesempatan penggunaan sumberdaya untuk kepentingan generasi mendatang dengan tetap memperhitungkan: *secara ekonomi*; (i) pertumbuhan, (ii) efisiensi, (iii) stabilitas produksi. *Secara sosial*; (i) pemberdaya, (ii) pembimbingan/konsultasi (iii) peranan Pemerintah. *lingkungan* ; (i) sumberdaya alam, (ii) pencemaran, (iii) daya tahan species dan keanekaragaman species.

Kay dan Alder (1999) menyatakan konsep pembangunan berkelanjutan harus berdasarkan 4 faktor yaitu ; (i) terpadunya konsep "equity" lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan; (ii) dipertimbangkan secara khusus aspek ekonomi;(iii) dipertimbangkan secara khusus aspek lingkungan; (iv) dipertimbangkan secara khusus aspek sosial budaya.

Pembangunan berkelanjutan dapat dinyatakan proses kegiatan yang menuju kebaikan dengan memperhitungkan daya dukung wilayah, yang meliputi, ekologi,ekonomi,sosial budaya,kelembagaan dan meminimumkan dampak kerusakan dari pembangunan itu sendiri.

Pengelolaan wilayah pesisir di era otonomi pendekatan pembangunannya adalah pendekatan pembangunan berkelanjutan, hal ini disebabkan wilayah pesisir sangat dipengaruhi oleh wilayah daratan maupun wilayah lautan, sebagai wilayah penyanggah dari daratan dan lautan, oleh karenaperubahan yang terjadi antara daratan dan lautan akan mempengaruhi wilayah pesisir antara lain kerusakan hutan dilahan atas atau pencemaran dilautan.

Wilayah pesisir menurut Masyhudzulkhak (2004) adalah pertemuan antara pengaruh daratan dan lautan, kearah darat sampai pengaruh perembesaan air laut dan angin laut, dan kearah daratan sampai pengaruhnya air tawar dan memiliki beragam sumberdaya yang pulih maupun tidak pulih. Secara sosial ekonomi wilayah pesisir tempat aktivitas manusia bersosialisasi yaitu; pemerintahan,sosial ekonomi,budaya pertahanan keamanan

Penguatan ekonomi lokal (PEL) menurut, *World Bank*; PEL sebagai proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal.

Penguatan Ekonomi Lokal, bertujuan untuk membangun kapasitas ekonomi dari suatu lokasi sebagai dasar untuk memperbaiki masa depan ekonomi dan kualitas kehidupan seluruh anggota masyarakatnya. Sementara, itu fokus PEL adalah upaya meningkatkan derajat kompetitif (*competitiveness*), meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjamin pemerataan dan meningkatkan kualitas dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Bank Dunia menggaris bawahi secara ideal pengembangan strategi PEL harus menjadi bagian integral dari proses perencanaan strategis yang dilakukan dalam skala lokasi yang lebih luas, misalnya provinsi dan kabupaten/kota.

Blakely and Bradshaw menyatakan; PEL adalah proses dimana pemerintah lokal dan organsisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

International Labour Organization (ILO); PEL adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya local dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir

menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi.

A. H. J. Helming menyatakan bahwa; PEL adalah suatu proses dimana kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang (pertumbuhan) ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Menekankan pada kontrol lokal, dan penggunaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik.

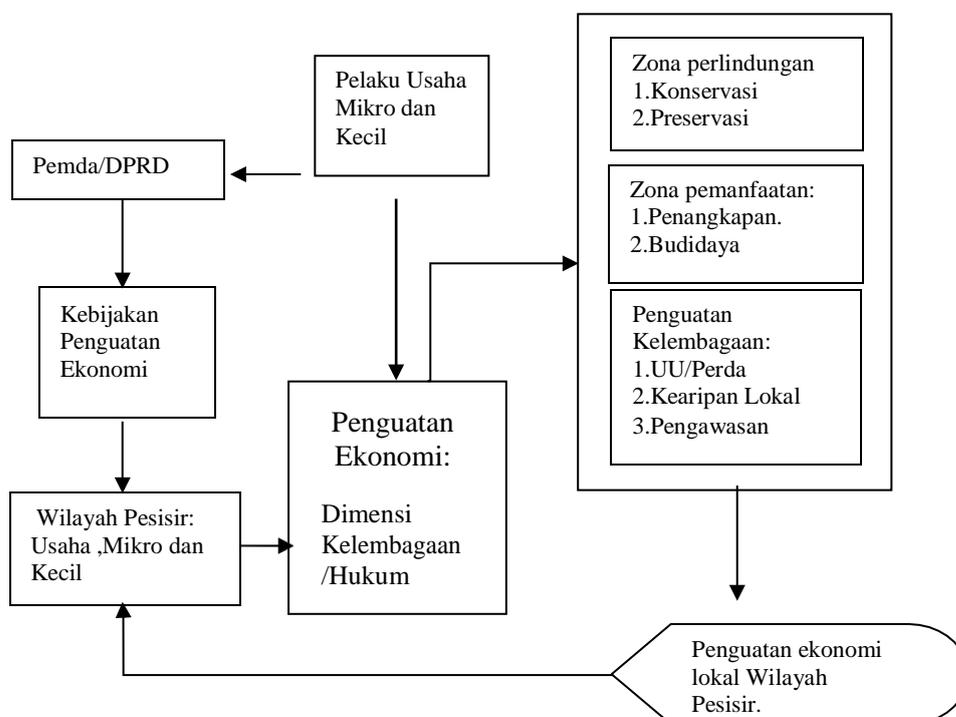
Giancarlo Canzanelli menyatakan; PEL adalah proses yang tepat untuk menciptakan kondisi yang sesuai untuk ketenagakerjaan yang berkelanjutan, penciptaan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah untuk memperluas pembangunan manusia dan lapangan kerja yang layak.

Untuk itu Penguatan Ekonomi Lokal (PEL) adalah; mengoptimalkan sumberdaya lokal sesuai daya dukung wilayah baik sumberdaya alam, buatan dan sumberdaya manusia yang melibatkan pemerintah termasuk lembaga non pemerintah dalam

mengembangkan ekonomi, dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal suatu wilayah.

Penguatan ekonomi lokal wilayah pesisir tidak semata-mata dipandang sudut ekonomi saja namun diperlukan keterpaduan pengelolaannya yang meliputi dimensi sosial ekonomi dan dimensi kelembagaan mencakup ekosistemnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penguatan ekonomi lokal wilayah pesisir.

Keberhasilan penguatan ekonomi lokal wilayah pesisir tidak terlepas dari kemauan politik Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan. Untuk itu perlu secara cermat pemerintah daerah mempertimbangkan dari semua aspek yang ada di wilayah pesisir. Sehubungan dengan itu pula penguatan ekonomi lokal wilayah pesisir perlu adanya payung hukum (perda) dengan ketersediaan peraturan daerah landasan hukum dalam pengelolaan ekonomi lokal dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis formil. Sejelasnya di gambarkan dalam diagram 1.



Gambar 1. Penguatan ekonomi Lokal Wilayah Pesisir

KERAGAAN USAHA MIKRO DAN KECIL WILAYAH PESISIR BENGKULU

Bengkulu secara geografis terletak di pantai bagian barat Sumatera mempunyai potensi sumberdaya pesisir dan lautan yang besar dan beragam. Hal ini disebabkan dua pertiga wilayahnya merupakan kawasan pesisir. Potensi sumberdaya wilayah pesisir tersebut dapat digali sesuai dengan kemampuan daerah dan dapat dijadikan salah satu sentra produksi baru dalam menumbuhkembangkan perekonomian daerah.

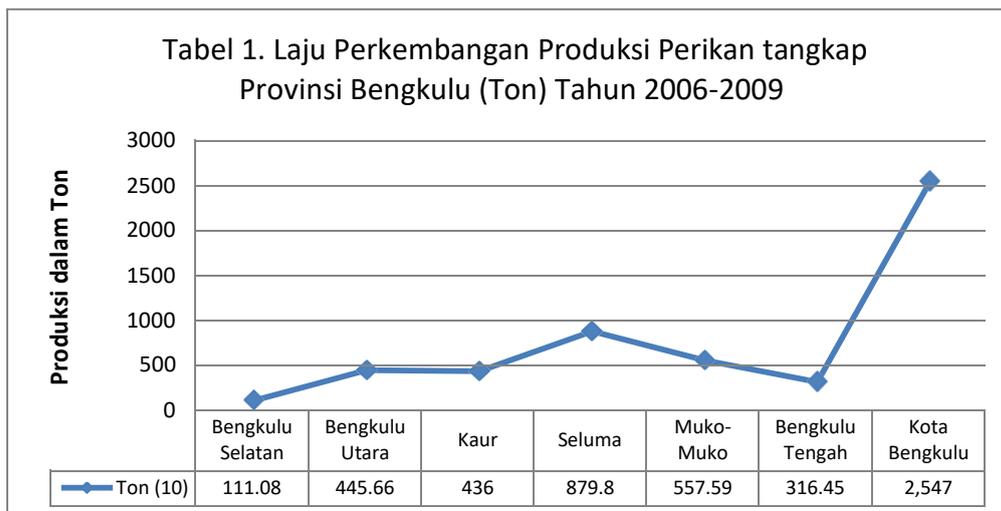
Luas dan besarnya wilayah pesisir Bengkulu tersebut belumlah menjadi tulang punggung ekonomi daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah berbagai bidang. Pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir pada saat ini belum mampu

memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah khusus pembangunan ekonomi.

Usaha mikro dan kecil wilayah pesisir pada umumnya usaha yang dilakukan masih tradisional belumlah banyak menyentuh aspek manajerial yang sesuai dengan badan usaha secara modern. Secara konsep usaha mikro dan kecil wilayah provinsi Bengkulu :

1. Usaha mikro nelayan tangkap yang mempunyai perahu tanpa Motor
2. Usaha kecil nelayan tangkap yang mempunyai Perahu Motor 1 s/d 5 ton.

Jumlah usaha mikro, kecil di wilayah pesisir, untuk usaha mikro berjumlah 1.664 dan usaha kecil berjumlah 1.817. Sedangkan tingkat produksi dari usaha mikro dan kecil sejelasnya digambarkan dalam tabel berikut ini:



Jumlah Produksi secara keseluruhan perikanan tangkap pada Tahun 2009 sebesar 41.088,9 dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar (PDRB) Rp. 564.822.990. (dalam harga berlaku).

STRATEGI PENGUATAN EKONOMI LOKAL WILAYAH PESISIR

Penguatan ekonomi lokal, wilayah pesisir kebijakan strategi adalah; (i) strategi pengaturan kelembagaan, (ii) strategi

efisiensi pemanfaatan sumberdaya ekonomi.

Strategi pengaturan kelembagaan; peranan Pemerintah yang mempunyai otoritas yang diberikan UU No 32 dan No.33 berpeluang dalam penataan dan tata kelola pembangunan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan usaha mikro dan kecil wilayah pesisir Kota Bengkulu. Hal ini disebabkan sebagai institusi yang berwenang dapat mengarahkan dan memberikan dorongan terhadap pelaku kegiatan di wilayah pesisir dengan

membuat kebijakan dan pengaturan yang efektif dan efisien.

Kebijakan pengaturan dalam kegiatan usaha wilayah pesisir peran serta Pemerintah daerah sangatlah strategis dalam pengembangan dan pertumbuhan usaha mikro dan kecil wilayah pesisir di Provinsi Bengkulu. Dalam upaya pemanfaatan sumberdaya pesisir pengaturan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, Pemerintah daerah haruslah mempertimbangkan daya dukung bio fisik wilayah pesisir, sesuai dengan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan.

Pengaturan kelembagaan adalah landasan *rules of the game* di wilayah pesisir dengan cara membuat payung hukum yang jelas dan transparan memberikan kepastian usaha mikro dan kecil dalam berusaha.

Strategi Efisiensi Sumberdaya ekonomi; strategi ini lebih difokuskan dalam

pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir, secara, ekonomi, sosial budaya, dengan memperhitungkan daya dukung ekonomi dan daya dukung sosial wilayah pesisir. Pentingnya mempertimbangkan daya dukung ekonomi, sosial, sebagai upaya keberkelanjutan produktivitas sumberdaya wilayah pesisir.

Dengan efisiensi ekonomi dapat meminimumkan kerusakan sumberdaya wilayah pesisir dan mengurangi depresiasi rente ekonomi, disparitas pendapatan dan terjaminnya sumberdaya pesisir di Provinsi Bengkulu. Usaha yang perlu dilakukan tata kelola pengembangan ekonomi lokal sebagai kekuatan perekonomian daerah. Selain itu perlu membagi zona-zona pemanfaatan dan konservasi.

Strategi pengelolaan penguatan ekonomi wilayah pesisir dimasa otonomi daerah dibutuhkan *framework* pengelolaan. Selengkapnya dapat disajikan dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. *Framework* Pengelolaan Usaha Mikro Dan Kecil Wilayah Pesisir Di Bengkulu

Strategi Pengelolaan Usaha Mikro dan Kecil			
		Ekonomi	Kelembagaan dan Hukum
Kebijakan Daerah	Epektifitas pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalokasian sumberdaya pesisir, tetap menjamin keberkelanjutan sumberdaya 2. Memberikan Aksebilitas dan fasilitas berusaha (biyai Tranksaksi, modal) 3. Pengaturan tata Niaga dan Informasi Pasar 4. Menciptakan Iklim berusaha yang kondusif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penata Tata Ruang dan zona pemanfaatan 2. Penegak hukum terhadap pemanfaatan sumberdaya pesisir yg tidak ramah lingkungan (pemakaian Trwal) 3. Kordinasi antara Instansi dalam pengembangan usaha UMK 4. Mendorong peranan Kearipan lokal dan modal sosial masyarakat pesisir. 5. Adanya Limted Entry terhadap usaha besar dan menengah
	Efisiensi Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong kemitraan, pemerata pendapatan, penyerapan tenaga kerja, alih teknologi 2. Peningkatan mutu produksi 3. Pengembangan fasilitas produksi (Cold stroge) 4. Pengembangan Produksi 5. Pengembangan Pasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda Yang mendorong Penguatan UMK 2. Mendorong Kemitra Usaha dan jejaring kerja 3. Penguatan distribusi hasil produksi UMK 4. Penegmbangan jiwa wiraswasta 5. Pelatihan

KESIMPULAN

Wilayah pesisir di era otonomi, belumlah mengacu pada pembangunan berkelanjutan dan mempertimbangkan daya dukung wilayah pesisir, penguatan ekonomi lokal wilayah pesisir terutama pengelolaan usaha mikro dan kecil masih bersifat sektoral dan belum terpadu

Strategi Kebijakan yang perlu dilakukan adalah efektifitas pengaturan dan efisiensi pemanfaatan dengan cara pengelolaan yang terpadu, yang mempertimbangkan karakteristik sumberdaya wilayah pesisir dan kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2009. *Bengkulu Dalam Angka*. Penerbit Badan Pusat Statistik Propinsi Bengkulu.
- Bengen, D. G. 2001. *Ekosistem dan Sumberdaya pesisir dan lautan*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan lautan, Institut Pertanian Bogor.
- Budiharsono, S. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan*. Jakarta. Cetakan Pertama PT Pradnya Paramita.
- Cicin - Sain B, and R.W. Knecht. 1998. *Intergrated Coastal And Ocean Management. Concept and Practices*. Washington D.C. Island Press.
- Clark. R Jhon,. 1996. *Coastal Zones Management Hand Book*. Lewis Publishers, Boca Raton London New York Washington, D.C.
- Dahuri, R, J. Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu. 1996. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu*. Jakarta. Cetakan Pertama PT.Pradnya Paramita Jakarta.
- Fauzi, A. 2004. *Ekonomi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*. Jakarta. Penerbit PT Gramedia.
- Hidayat Syarif dan Masyhuri.2001. *Menyingkap Akar Persoalan Ketimpangan Ekonomi di Daerah Sebuah Kajian Ekonomi Politik*. Jakarta. Penerbit Pamatator
- Jackie and Kay,. *Coastal Planning and Management*. London and New York. E & FN SPON An imprint of Routledge.
- Kuncoro Mudrajad. 2010. *Masalah, Kebijakan, dan Politik, Ekonomika Pembangunan*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Kusnadi. Drs. M.A.2006. *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Alam*. Yogyakarta. Penerbit LkiS.
- Leo Agustino.2011. *Sisi Gelap Otonomi Daerah*. Bandung Penerbit Widya Pajajaran.
- Mubyarto. 2001. *Prospek Otonomi Daerah Dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*. Yogyakarta Penerbit BPFE.
- Mangkoesoebroto Guritno.Dr.,M.Ec.2010. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta.Penerbit BPFE. Universitas Gajah Mada.
- Masyhudzulkhak.2007. *Analisis Tata Niaga Perikanan Tangkap*.Bogor. Penerbit Jurnal PKSPL IPB. Jurnal Pesisir Dan lautan Akreditasi No.22/Dikti/Kep.202. ISSN 1410-7821 Volume 8. No.1.
- Munasinghe, M. 2001.*Analyzing The Nexus of Sustainable Development ang Climate Change: An Overview*. Srilangka. Munasinghe Institut for Development (MIND).
- Prawirokusumo Soeharto. 2001. *Ekonomi Rakyat (konsep, Kebijakan, dan Strategi)*.Yogyakarta. Penerbit. BPFE.
- Purwanti Puji.Dr.Ir. 2010.*Model Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Sekala Kecil*. Malang. Penerbit Universitas Brawijaya Press.
- Sajogyo dan Sumantoro Martowijoyo.2005. *Pemberdayaan Ekonomi rakyat Dalam Kancah Globalisasi*.Bogor. Penerbit Sains.
- Tambunan Mangara.2010. *Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan Mengerakan Kekuatan Lokal dalam Globalisasi*. Jakarta. Penerbit Graha Ilmu.
- Undang-Undang Otonomi Daerah. *UU.NO.32 dan UU No 33 Tahun .2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta Penerbit Fokusmedia.